

ABSTRAK

MAHFUD HADI, Pemberlakuan Peradilan Koneksitas Dalam Perspektif Praktik Hukum Pidana. Di bawah bimbingan Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, SH., MS. dan Tolib Effendi, S.H., M.H.

Penyusunan skripsi ini, dilatar belakangi adanya tindak pidana umum yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota militer dan sipil yang tidak diproses pada jalur yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan Indonesia. Pada praktik hukum pidana di tahapan legislasi undang-undang sudah secara jelas dan terperinci mengatur perkara koneksitas dan sejauh mana kompetensi peradilan tersebut, namun pada tahapan praktik persidangan seringkali undang-undang yang ada dikesampingkan dengan alasan-alasan tertentu.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah konsep yang selama ini dianut oleh KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia telah tidak dapat lagi mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat atau bahkan sebaliknya, peraturan perundang-undangan telah mampu mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan, namun pada tatanan praktik penyidikan dan persidangan yang perlu di perbaharui (diperbaiki), sehingga pada akhirnya tidak ada lagi perdebatan dan tumpang tindih kewenangan pengadilan dalam mengadili, dan memutus perkara koneksitas.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dipadukan bahan hukum berupa KUHAP, TAP MPR VII/MPR/2000, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Teori hukum pidana dan koneksitas disajikan dalam skripsi ini seperti karakteristik koneksitas, kompetensi absolut dan relatif pengadilan, Maksud dan Tujuan koneksitas. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membuat undang-undang sebagai supremasi hukum tertinggi tanpa intervensi dan pengaruh dari golongan-golongan tertentu, sehingga persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci : Koneksitas, Kompetensi, Peradilan

ABSTRACT

Mahfud hadi, **The Implementation of Judicial Koneksitas in Perspective Practice of Criminal Law.** Under the guidance of Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, SH., Ms. and Tolib Effendi, SH., MH

The preparation of this thesis, exposed their lack of common criminal acts committed by members of the military and civilian members are not processed on the line that has been mandated by legislation Indonesia. On the practice of criminal law in the stages of legislation already clearly and detailed set of case koneksi and the extent of the competence of the judiciary, but at the stage of trial practices often existing legislation excluded by specific reasons.

The benefits that can be gained from the writing of this thesis was to find out whether the concept that has been embraced by the CODE of CRIMINAL PROCEDURE and other legislation have Indonesia can no longer accommodate the interests of the public or even the contrary, legislation has been able to accommodate all the interests and needs of the community will be justice, but at the order of the practice of investigation and trial that needs to be updated (fixed), so in the end there is no more debate and overlapping authority of the courts in adjudicating and disconnect the connection point.

Methodology research in thesis this is juridical normative, arranged by using Statute Approach and Conceptual Approach be material form of KUHAP, TAP MPR VII / MPR / 2000, act no. 48 / 2009 on Judicial Power; and act No. 31 / 1997 on Judicial Military. Theory criminal law and koneksi served in a thesis this like characteristics koneksi, absolute competence and relatively court, the purpose and objective koneksi. The research obtained expected to legislate as law supremacy highest without the intervention and influence of group certain so that equation before the law (Equality Before The Law) and legal certainty expected society can be achieved.

Keyword : Koneksi, Competence, The Court